



PKS

MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA

PERJUANGAN MENJAGA IDEOLOGI BANGSA

Bismillā hirrah mā nirrahīm.

Ikhwatifillah rahimahullah,

Dalam memahami relasi Islam dan negara, Kita harus berpijak pada pemahaman yang jernih, dewasa, dan berakar pada sejarah bangsa.

Negara, pada hakikatnya, adalah KERANGKA (ini yang di-*tauji*-kan Almarhum Ustadz Hilmi Aminuddin, semoga Allah SWT terangi alam kuburnya dan terima amal ibadahnya)—sebuah sistem, struktur, dan alat untuk mengatur kehidupan bersama. Negara bukan tujuan akhir (*ghayah*), melainkan wadah untuk mewujudkan cita-cita luhur.

Bung Karno menegaskan bahwa:

"Negara bukanlah tujuan, negara adalah alat."

Negara adalah alat (WASILAH) untuk mencapai masyarakat yang adil, makmur, dan bermartabat.

Karena ia adalah alat, maka arah negara sangat ditentukan oleh nilai yang mengisinya. Kerangka yang sama bisa melahirkan KEADILAN, tetapi juga bisa melahirkan kezaliman, tergantung siapa dan nilai apa yang menggerakkannya.

Negara ibarat panggung kontestasi (*contested terrain*) untuk berkompetisi memenangkan nilai kebaikan.

Ikhwatifillah rahimahullah,

Bung Karno juga meminta agar kaum muslimin berbondong-bondong mengisi parlemen. Kalau lembaga legislatif diisi oleh kaum muslimin, maka produk undang-undang yang dihasilkan juga sarat dengan nilai-nilai islami.

Indonesia adalah negara religius, yang mengakui eksistensi Allah SWT, yang menganugerahkan kemerdekaan pada bangsa ini.

Dalam Pembukaan UUD 1945 secara ekspilisit tertulis tegas, bahwa kemerdekaan Indonesia adalah:

"Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa."

Ini adalah pengakuan konstitusional terhadap kekuatan transendental, pada kedaulatan Tuhan.





PKS

**MAJELIS PERTIMBANGAN PUSAT
PARTAI KEADILAN SEJAHTERA**

Ikhwatifillah rahimahullah,

Republik ini lahir bukan semata karena kekuatan manusia, tetapi karena kehendak dan rahmat Allah. Maka Indonesia adalah negara religius, negara yang beriman kepada tauhid, bukan negara yang memisahkan agama dari nilai publik.

Wahai Para Ikhwah,

Di sinilah letak tugas sejarah Kita. Karena negara adalah KERANGKA yang netral, maka kewajiban Kita adalah mengisinya dengan nilai-nilai syariat Islam—bukan dengan paksaan simbolik, tetapi dengan substansi: keadilan, amanah, kejujuran, perlindungan terhadap yang lemah, dan keberpihakan kepada rakyat.

Syariat Islam adalah sumber nilai untuk menuntun: kekuasaan agar tidak zalim, hukum agar tidak tebang pilih, dan kebijakan agar menghadirkan kemaslahatan.

Ikhwatifillah rahimahullah,

Inilah dakwah politik yang sejati: menghidupkan nilai Islam dalam praktik kenegaraan.

Karena itu, jalan Kita adalah perjuangan konstitusional di dalam SISTEM NEGARA.

Kita tidak merobohkan KERANGKA negara, tetapi justru menguatkannya. Kita tidak mengganti Indonesia, tetapi menjaganya dari dalam. Inilah jalan yang selaras dengan Islam dan setia pada cita-cita para pendiri bangsa.

Negara adalah KERANGKA dan alat perjuangan.

Pancasila adalah titik temu kebangsaan.

Syariat adalah sumber nilai.

Tauhid adalah ruh negara.

KEADILAN adalah tujuan.

Allā humma tsabbīt qulūbanā 'alā dīnik.
(Ya Allah, tetapkanlah hati kami di atas agama-Mu).

**Majelis Pertimbangan Pusat
Partai Keadilan Sejahtera,**

Ketua,

Dr. H. Mulyanto, M.Eng.

